

The REVITALIZATION of TRADITIONAL ISLAMIC SPIRIT:
An Effort to Keep Moderate and Tolerant Religious Model

By Amrizal

Abstract: *The implementation of comprehensive democracy after reformation era has created new atmosphere for the reinforcement of absolute puritanical idea in Indonesian context. Nowadays, the segment of this idea is not only in cultural level but structural level which is systematic and wide. This situation causes the complex religious dynamics in Indonesia.*

A solution to counterbalance the spread of the “right wing” of Islam which is, to some extent, worrying is to keep moderate and tolerant religious model which could develop the social order of the society which has been harmonious up to now.

REVITALISASI SPIRIT ISLAM TRADISIONAL:

Upaya Mewariskan Model Keagamaan Moderat dan Toleran

Oleh Amrizal

Pendahuluan

Dalam Undang-undang R.I. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I No. 47 tahun 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR, disebutkan : Pasal 1 :*"Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat."*

Dan lebih jauh dijelaskan dalam pasal 55 :*"Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat"*.¹

Berdasarkan undang-undang SISDIKNAS diatas dapat dipahami bahwa masyarakat berhak untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang relevan berdasarkan *kekhasan agama* yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Dalam hal ini di Provinsi Riau umumnya dan Pekanbaru khususnya mayoritas masyarakatnya beragama Islam, hal ini karena Riau didiami oleh masyarakat melayu yang memang menganut agama Islam. Persoalannya kemudian bahwa dalam realitasnya, eksistensi

¹ Undang-undang R.I. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I No. 47 tahun 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR, Bab Ketentuan Umum Pasal I

lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat ini banyak menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang kadang sulit untuk diatasi.

Jika dilihat dari jenis dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang terdapat di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, bervariasi antara satu dengan lainnya. Namun dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada pendidikan di Madrasah Diniyah takmiliyah awaliyah (MDTA) karena apabila ditinjau dari aspek historis, eksistensinya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda walau masih dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Hal ini dapat kita lihat pada masa penjajahan hampir pada semua desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah), dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti *pengajian*, *surau*, *rangka*, *sekolah agama* dan lain-lain. Mata pelajaran agama juga berbeda-beda, yang pada umumnya meliputi Aqidah, ibadah, Akhlak, membaca Al-Qur'an dan Bahasa Arab. Penyelenggaraan Madrasah diniyah (Diniyah Takmiliyah) biasanya mendapat dukungan dan bantuan masyarakat.²

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan pendidikan agama, Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, Misalnya penambahan pelajaran Bahasa Inggris dan berbagai Ektrakurikuler pada beberapa MDTA yang ada di kota Pekanbaru seperti : Rebana, pidato, Tahfidz, Olahraga, Seni tilawah dll.

Dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah), Kementerian Agama menetapkan peraturan Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) antara lain dijelaskan :

1. Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliyah) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam, kepada pelajar berusia 7 sampai dengan 19 tahun.

² Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, 2007

2. Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah) bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar pendidikan umum.
3. Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah) ada 3 (tiga) tingkatan, yakni Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA), Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha (MDTW) dan Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya (MDTU).[3]

SEPUTAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA)

Pengertian

Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah dasar (SD/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun, dan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang.[4]

Kedudukan

Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama, berada di dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, atau tingkat organisasi sejenis.

Tujuan

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk :

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai :
 - Warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia,

- Warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat rohani dan jasmani.
- 2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
- 3. Mempersiapkan warga belajar untuk dapat mengikuti Pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah takmiliyah Wustha.

4. Fungsi

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah berfungsi :

1. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang meliputi : Al-Qur'an-Hadits, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar (SD)/sederajat;
3. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman ajaran Islam;
4. Membina hubungan kerjasama dengan orangtua warga belajar dan masyarakat;
5. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan serta perpustakaan.³

³ *Ibid*, Hlm. 2

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA)

NO	BIDANG STUDI	KELAS				KET
		I	II	III	IV	
01.	QUR'AN HADIST	4	4	4	4	
	a.Qur'an	-	-	(2)	(2)	
	b.Hadist	-	-	(2)	(2)	
	c.Terjemah-Tafsir	-	-	(2)	(2)	
	d.Tajwid	-	-	(2)	(2)	
02.	Aqidah -Akhlak	4	4	2	2	
03.	Fiqih - Ibadah	4	4	2	2	
04.	Sejarah kebudayaan islam	2	2	2	2	
05.	Bahasa arab	2	2	2	2	
06.	Praktek ibadah	2	2	2	2	

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIYAH (MDTA)

Diskriminasi terhadap pendidikan di Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah adalah sesuatu hal yang nyata adanya, khususnya telah dirasakan oleh para pelaku yang terjun langsung di lapangan. Meski perannya yang cukup penting dalam membina moralitas dan akhlak generasi muda Islam, terutama sebagai pendidikan awal dalam memahami ilmu-ilmu keislaman. Pengalaman penulis yang telah mengajar di MDTA Al Muhajirin 1 sejak tahun 2003 hingga saat ini (2013), menjadi bukti nyata akan justifikasi apa yang akan penulis paparkan dalam tulisan ini. Ironisnya lagi, masih banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan Madrasah Diniyah Takmilyah tersebut.

M. Arifin menegaskan bahwa titik kelemahan madrasah pada umumnya terletak pada tenaga pengelolanya karena mereka kurang berorientasi pada profesionalisme.[6] Hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya pada pengelola maupun majelis guru yang mengajar karena biasanya MDTA hanya dianggap sebagai “*pelengkap*” dan tenaga yang dipakai untuk mengajar hanya “*tenaga sisa*” dari tempat lain. Secara garis besar problematika pendidikan di Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.

Internal meliputi birokrasi dan administrasi MDTA termasuk di dalamnya tenaga pelaksana yang terdiri dari Pengelola, Kepala sekolah dan para guru adapun eksternal berasal dari luar lembaga pendidikan tersebut.

Faktor Internal

Pengelola

Praktik manajemen di madrasah seringkali menggunakan model manajemen tradisional, yaitu model manajemen *paternalistik* dan *feodalistik*. Dominasi senioritas jelas mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreatifitas dan inovasi dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi ini mengarah pada penilaian negatif, sehingga memunculkan kesan bahwa meluruskan atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap sebagai sikap *su' al-adab* (tabiat jelek).[7]Meski dalam beberapa kesempatan, masih banyak pengelola yang mau menerima dan menghargai pendapat kepala sekolah dan majelis gurunya.

Tenaga Pendidik

Sejauh pantauan dapat dilihat, mayoritas tenaga pendidik di Madrasah MDTA adalah tamatan Pondok Pesantren atau tamatan MA sederajat. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap gaya dan model pendidikan yang digunakan. Model dan gaya pendidikan modern idealnya harus dikuasai oleh para pendidikan. Sebagai contoh, perubahan model pendidikan dari *Teacher's center* menuju *Studen's center* hari ini, harus dipahami oleh tenaga pendidik. Dahulu asumsi yang mengajarkan bahwa anak yang harus mengikuti seluruh instruksi guru, maka model pendidikan hari ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Hal inilah yang dinamakan pendidikan "PAIKEM" Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Edukatif dan Menyenangkan. Kalau dahulu pendidikan dengan system *Rotaniah*, dalam arti setiap kesalahan yang dilakukan seorang murid langsung dipukul dengan kayu atau rotan oleh gurunya. Sekarang hal itu tidak dibenarkan lagi karena bertentangan dengan Hak azazi manusia dalam hal ini KOMNAS perlindungan anak, bisa bisa malahan sang guru yang akan dilaporkan oleh murid ke polisi, akhirnya masuk penjara.

Skill / keahlian Tenaga Administrasi

Dapat kita lihat karena alasan ketiadaan dana/anggaran, beberapa MDTA tidak memiliki tenaga administrasi yang ahli dan profesional. Akibatnya terjadilah penempatan tenaga Administrasi/Tata Usaha MDTA yang bukan ahlinya karena ketiadaan dana atau anggaran berakibat pada kacaunya administrasi di MDTA tersebut, bahkan ada beberapa MDTA tidak memiliki tenaga administrasi. Ditambah lagi tenaga administrasi dan tenaga pendidik tidak menguasai teknologi alias "GAPTEK", akhirnya jadilah administrasi yang asal jadi atau hanya "libarokatuzimmah" sekedar melepaskan tanggung jawab kepada kementerian agama.

Dana

Rata-rata MDTA di kota Pekanbaru hanya mengandalkan pendanaan dari iuran SPP murid setiap bulannya walaupun ada ditambah dari beberapa donatur yang berinfak ke MDTA. Hal ini berimbas pada Biaya Operasional sekolah yang tersendat, mulai pengadaan sarana-prasarana pendidikan hingga honor para tenaga pengajar. Bahkan ada tenaga pengajar di MDTA yang hanya mendapat tunjangan dari Insentif walikota semata. Tentunya, Apresiasi yang cukup tinggi kepada beberapa Kepala daerah khususnya Walikota Pekanbaru yang memberikan perhatian serius terhadap pendanaan MDTA. Dengan memberikan insentif sebesar Rp. 400.000/bulan kepada para guru yang diterima pertriwulan.

Dapat dibayangkan, seandainya para wali murid terlambat membayar uang SPP setiap bulannya dan memang itulah pengalaman penulis selama mengajar di MDTA, tentu hal ini akan mengganggu semangat dan etos kerja para guru dalam menjalankan tugasnya. Ironisnya lagi, ada permintaan sebagian wali murid agar pendidikan di MDTA digratiskan saja dengan alasan urusan akhirat jadi harus ikhlas. Namun untuk membayar les-les di sekolah formal seperti SDN yang notabene mendapat subsidi dan bantuan rutin dari pemerintah meski ratusan ribu jarang dipersoalkan.

Sarana-prasarana

Beberapa MDTA ada yang belum memiliki ruang belajar walaupun sudah memiliki ruang belajar dalam keadaan yang sangat

mengkhawatirkan, mulai dari meminjam kelas SDN, menyewa ruangan dan ruangan kelas yang disekat-sekat dengan triplek hingga kelas siswanya yang belajar disatukan dua kelas dalam satu ruangan. Hal ini tentunya sangat mengganggu ketenangan murid dan para guru serta kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Ketiadaan komputer dan alat-alat pendukung pembelajaran lainnya yang saat ini dapat dikatakan sudah menjadi kebutuhan pokok pada setiap lembaga pendidikan manapun, menambah penderitaan yang tiada berkesudahan.

Faktor Eksternal

Masyarakat

Pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan di MDTA sebagai “*second education*” atau pendidikan nomor dua. Selama ini MDTA dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan kelas ekonomi, tidak bermutu, hanya mengajarkan agama semata, jurusan akhirat, tempat penampungan anak-anak miskin, bersistem kolot. Meski anggapan tersebut merupakan hal yang salah kaprah namun anggapan itu tetap bertahan mempengaruhi masyarakat umum, yang selama ini memang jauh dari kehidupan madrasah. Mereka terpengaruh lantaran tidak mengetahui realitas yang sebenarnya. Bahkan ada yang berasumsi MDTA hanya tempat belajar mengaji dan shalat saja, Tentu saja kondisi eksternal tersebut kurang menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan di MDTA, tantangan berat bagi setiap MDTA untuk membuktikan bahwa masih ada nilai-nilai plus yang dimilikinya.

Ekstrakurikuler di SDN

Hal ini berdasarkan pengalaman penulis, intensitas yang cukup tinggi berupa kegiatan Ekstrakurikuler di SD seperti Les, Latihan sepakbola, berenang, main musik dll yang waktunya bersamaan dengan jam pelajaran di MDTA. Akibatnya, banyak murid di MDTA yang jarang hadir ke MDTA terutama lagi bagi para murid SD yang duduk di kelas 5 dan 6. Boleh jadi ini benar karena MDTA hanya sebagai pendidikan nomor dua dan tidak memiliki status yang jelas. Mungkin sudah ada beberapa daerah yang mengharuskan kepada setiap murid baru yang akan masuk akan SMP, MTS sederajat harus memakai ijazah MDTA, sayangnya itu hanya tetap sebagai pelengkap saja.

Kebijakan Politik

Hal ini dapat kita lihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru senantiasa melemahkan upaya peningkatan mutu madrasah. Dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut pendidikan, madrasah selalu dianaktirikan oleh pemerintah Orde Baru. Alokasi dana yang diperoleh oleh madrasah negeri apalagi madrasah swasta selalu jauh lebih kecil daripada yang diperoleh sekolah negeri.[8]Padahal dalam Undang undang dasar pada pasal 31 ayat 3 berbunyi :”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahklak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Lebih diperkuat lagi dalam ayat 4 yang berbunyi :”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Mungkin undang-undang diatas tidak berlaku untuk MDTA.

Berdasarkan pengalaman, setiap kali dilaksanakan PILKADA di provivnsi Riau ditingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi, suara guru-guru MDTA selalu menjadi rebutan dan sangat memegang peranan penting dalam kancah perpolitikan. Hal ini disebabkan karena memang jumlah guru MDTA yang cukup banyak dan cukup signifikan suaranya, apalagi dengan sistem pemungutan suara langsung saat ini.

ANALISA PERMASALAHAN

Pengelola dan Kepala MDTA

Biasanya pengelola MDTA adalah dalam bentuk Yayasan atau dibawah Pengurus Mesjid yang menempatkan salah satu seksi atau bagian yang khusus menangani masalah pendidikan baik pendidikan agama, dengan pelaksana tugas harian dari Kepala sekolah dan majelis guru. Seharusnya pihak pengelola senantiasa berfikir untuk memajukan pendidikan di MDTA, baik dalam bentuk pencarian dana guna menunjang pengadaan sarana prasarana pendidikan maupun untuk peningkatan kesejahteraan guru, jadi jangan sekedar mendikte saja dengan

tuntutan yang melangit. Mustahil rasanya menginginkan kualitas pendidikan yang baik di MDTA, tanpa dukungan sarana prasarana pembelajaran yang baik dan kesejahteraan yang memadai.

Tenaga pendidik

Seharusnya para pendidik di MDTA berusaha meningkatkan potensi diri baik dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) maupun dengan mengikuti pelatihan-pelatihan keguruan yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri. Hal ini penting karena anak-anak hari ini disuguhkan dengan berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi baik melalui internet atau faktor lainnya. Zaman yang mereka hadapipun sudah berbeda dengan zaman para guru dahulu. Mau tidak mau, suka tidak suka para guru harus mau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau tidak mereka akan ditinggalkan para muridnya. Merubah pola pendidikan tradisonal menuju pendidikan modern dengan tetap mengedepankan Akhlakul karimah.

Skill / keahlian Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi di MDTA juga harus dibenahi, idealnya mereka yang benar-benar profesional dan menguasai teknologi. Bagaimana mungkin, akan menghasilkan administrasi yang berkualitas sedangkan tenaga administrasinya tidak kompeten. Apalagi saat ini, segala urusan berkaitan dengan teknologi. Sebagai contoh, dalam pembuatan laporan bulanan sudah menggunakan data matrik dan mendaftar ke Kemenag pusat secara online. Namun sayangnya, anggaran yang sangat minim bahkan tidak ada menyebabkan pekerjaan administrasi MDTA harus dihandle oleh staf pengajar/guru yang bukan ahlinya akhirnya terjadilah rangkap jabatan.

Dana

Inilah masalah krusial dan terpenting di MDTA mungkin juga di lembaga pendidikan lainnya, ketiadaan dana operasional mengakibatkan menjadi momok yang menghambat. Akhirnya Kepala sekolah dan para guru tidak hanya dituntut menyiapkan materi pembelajaran dengan baik tapi juga berusaha berfikir untuk mencari tambahan dana. Hal ini terjadi,

karena ketiadaan dana bantuan seperti di sekolah-sekolah formal baik dana BOS, BOM dll. Bahkan banyak guru yang mencari pekerjaan lain, selain mengajar di MDTA guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus melambung, tinggallah hanya “*tenaga sisa tau tenaga lebih* “. Jadilah pendidikan di MDTA “*la yahya wala yamut*” hidup segan mati tak mau.

FAKTOR EKSTERNAL

Masyarakat

Suatu saat ada seorang ibu bertanya kepada saya, :”Apa MDTA itu ? Apakah hanya sekedar untuk mengaji saja atau hanya untuk belajar shalat saja ? Gratis gak belajar disana ?”. Dari beberapa pertanyaan diatas, jelaslah bagi kita akan pandangan sebagian masyarakat terhadap keberadaan pendidikan MDTA. Belajar shalat dan mengaji saja, itulah asumsi masyarakat selama ini terhadap MDTA. Padahal banyak kurikulum yang diajarkan di MDTA, ironisnya lagi karena berkaitan dengan pelajaran agama maka sebagian meminta untuk digratiskan saja. Dengan honor pas-pasan, yang sangat jauh sekali seperti gaji PNS, Pejabat atau anggota DPR diminta pula lagi untuk digratiskan biaya pendidikan di MDTA.

Ekstrakurikuler di SDN

Persoalan ini kurang jelas sebabnya, apakah karena komunikasi yang kurang antara pihak MDTA dengan pihak SDN namun itulah kenyataannya. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah formal seperti Les, privat dll sayangnya lagi kegiatan tersebut bersamaan waktunya dengan proses belajar di MDTA. Akhirnya dengan alasan les, privat dsb banyak anak-anak yang tidak datang belajar ke MDTA. Himbuan hingga ancaman bahwa tidak akan lulus Ujian akhir Madrasah (UAMDA) tidak digubris dan dipedulikan oleh anak-anak. Jadilah, ada yang datang sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan bahkan ada yang datang hanya ketika ujian saja. Istilah “*ITIL*” ilang-ilang timbul akan kehadiran murid MDTA sudah menjadi pemandangan yang biasa di MDTA dengan berbagai alasan.

Kebijakan Politik

Seperti yang telah penulis paparkan diatas, khusus di kota pekanbaru dengan jumlah guru MDTA kurang lebih 2 ribuan lebih menjadikan suara guru MDTA tersebut sangat diperhitungkan untuk

PILKADA. Tentunya dapat dijadikan mesin politik untuk menaikkan calon tertentu. Mudah-mudahan bukan hanya menjelang PILKADA dibutuhkan tapi tetap diperhatikan meski sudah duduk menjadi kepala daerah dengan terus meningkatkan kesejahteraan guru-guru MDTA.

Terkhusus kepada Pemerintah terutama Kementerian Agama yang mengurus masalah pendidikan MDTA baik tingkat pusat maupun daerah, meski MDTA hanya sebatas pendidikan non formal dan mengajar ilmu agama berilah juga kami bantuan dana seperti sekolah-sekolah formal lainnya bukan dari dana sisa saja. Sekalipun swasta dan non formal kami juga mengajarkan ilmu pengetahuan kepada generasi muda untuk memperbaiki moralitas dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di masa globalisasi, Jangan ada lagi diskriminasi pendidikan agama dan umum.

PENUTUP

Demikianlah sekelumit problematika pendidikan di MDTA atau pendidikan yang berbasis masyarakat, sesungguhnya dekadensi moralitas di kalangan generasi muda saat ini boleh jadi salah satu faktornya disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang berimbas pada krisis iman dan takwa. Peristiwa yang terjadi sehari-hari saat ini, seperti Geng motor, Narkoba, *Freesex* (sek bebas), pergaulan bebas, kriminalitas di kalangan remaja sudah dapat kita jadikan *i'tibar* (pelajaran).

Oleh karena itu, seluruh stakeholder negeri ini, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif seharusnya memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan umum maupun agama melalui kerjasama dan hubungan yang harmonis dalam rangka memfilter penyakit masyarakat (PEKAT) yang meresahkan tersebut. Jadi bukan hanya sebatas menghukumi tapi lebih mengutamakan aspek preventif (pencegahan). Ibarat dalam teori pendidikan selalu mengedepankan "*Reward and Punishment*".

Semoga tulisan ini mampu membangun opini yang baik dikalangan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di MDTA, sehingga memberikan warna yang positif terhadap keberlangsungan pendidikan di MDTA kedepannya guna mewujudkan "*baladatum toyibatun wa Robbun ghofur*".

Karena memang, peran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menjadi sangat penting agar dapat menjadi tumpuan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air Indonesia tercinta sehingga moral anak bangsa Indonesia terwujud dengan keluhurannya.

Selanjutnya seluruh Pengelola, Kepala MDTA dan tenaga pengajar MDTA teruslah bekerja, bekerja dan berkarya demi agama, bangsa dan Negara mengajarkan ilmu agama semoga terwujud generasi yang *shaleh* dan *shalehah* meski pendidikan di MDTA bukan suatu jaminan, Tentunya dalam penyajian tulisan ini terdapat kekurangan baik secara teknis maupun non teknis, Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Amrizal, M.Ag, adalah *Dosen tetap pada STAI Al-Kaustar Bengkalis.*